

Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara).

**Harianto Ardiansyah Wumu
Flonce.D.J Lengkong
Salmin Dengo**

Abstract : The establishment of autonomous regions is intended to optimize the governance intended to create regional governments are better able to optimize public services and improve local community empowerment on a wider scale luas. Namun there are obstacles and complaints that occur in organizing services to the community such as, yet effective, efficient , transparent, responsive, fair and responsible. This study aimed to determine and quantify the effect of the sub-district division policy on public services in the district of North Minahasa regency Kema. The method used in this study using a quantitative correlation with the approach of quantitative analysis using statistical formulas descriptive and inferential statistics. The results were obtained the following equation: $Y = 6.534 + 0.956 X$. The regression coefficient $b = 0.956$ which is positive, clearly demonstrates that the functional relationship / influence kebijakan pemekaran variable regions with public services is positively associated with the development pattern of 1: 0.956; means change / improvement of division policy wilayah sebesar 1 scale / unit will cause a change / improvement of public services 0.837 units / scale. Pattern functional relationship / influence of division policy on public services is very significant or very significant, as demonstrated by the results of testing the significance of regression with F-test obtained value of $F = 298,212$ pada significant level of 0.000 $y = 6.534 + 0.956 (60) = 63.894$

The prediction accuracy of the calculation results above indicate that if the quality of division policy could be improved by the value (score) ideal variables (ie 60) of the present condition, it can diprediksi an increase in public services in the district amounted to 63.894 scale Kema. This prediction calculation results may indicate that the expansion policy of the districts peningkat a significant effect on public services;

Keywords: *influence, regional divisions, to service publik*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pasal 18 ayat (1) mengamatkan bahwa Negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang⁷. Pada ayat (2) disebutkan, Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada ayat (5) disebutkan, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut maka UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pengertian otonomi daerah adalah hakwewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang undangan. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi/hukum, agama).

Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu : (1) Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di bandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas maka pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal akan lebih tersedia. (2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan di kembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah yang selama ini tidak tergal. (3) Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan..

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat korelasional. Penggunaan metode kuantitatif yang bersifat korelasional oleh karena penelitian ini bermaksud “mengukur” hubungan dan pengaruh variabel bebas (kebijakan pemekaran wilayah kecamatan) terhadap variabel terikat (pelayanan publik). Menurut Umar (2000), penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang didasarkan atas data angka-angka dan perhitungannya ditujukan untuk penafsiran kuantitatif. Borg dan Gall (dalam Arikunto, 2000) mengatakan bahwa

penelitian yang bersifat korelasional adalah untuk meneliti hubungan atau pengaruh antara dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian korelasional peneliti memilih individu-individu yang mempunyai variasi dalam hal yang diselidiki; semua anggota kelompok yang dipilih sebagai subyek penelitian diukur mengenai dua jenis atau lebih variabel yang diselidiki, kemudian dihitung untuk diketahui koefisien korelasinya.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu “kebijakan pemekaran wilayah kecamatan” (sebagai variabel bebas atau *independent variable*, diberi simbol variabel X), dan “pelayanan publik” (sebagai variabel terikat atau *dependent variable*, diberi simbol variabel Y). Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

➤ Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, didefinisikan secara operasional sebagai tindakan atau keputusan pemekaran Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kauditan, dan Kecamatan Kema sebagai kecamatan hasil pemekaran. Variabel ini diamati dalam beberapa indikator sebagai berikut :

- Peningkatan jangkauan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kemudahan masyarakat untuk menjangkau pusat pelayanan pemerintah kecamatan (kantor Camat);
- Tersedianya SDM aparatur pelayanan publik pada pemerintah kecamatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

- Tersedianya sumberdaya finansial (dana/anggaran) serta sarana dan fasilitas yang memadai pada pemerintah kecamatan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- Variabel Pelayanan Publik; didefinisikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Secara konkrit tingkat efektivitas organisasi ini diamati dan diukur dari beberapa indikator sebagai berikut :
- Kemudahan pelayanan (meliputi : persyaratan administrasi, persyaratan teknis);
 - Kecepatan pelayanan, yaitu kecepatan dalam merespons atau melayani keperluan/kebutuhan masyarakat;
 - Ketepatan pelayanan (meliputi : prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan);
 - Akurasi produk pelayanan (meliputi : kualitas produk layanan, ketelitian produk layanan, kepuasan atas produk layanan).

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Keluarga yang ada di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang tersebar pada 10 (sepuluh) Desa yang sesuai data terakhir sebanyak 4.491 KK.

Pengambilan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu ; (1) Pengambilan sampel area/lokasi yaitu desa-desa sampel; dalam hal desa sampel ditetapkan sebanyak 4 (empat) desa yang diambil dengan teknik

“*purposivesampling*”(sampel bertujuan atau atas pertimbangan tertentu) yaitu Desa Lansot, Desa Kema Tiga, Desa Tontalete, dan Desa Kema Satu. Penentuan desa-desa sampel tersebut mempertimbangkan letak dan tingkat kemajuan desa. (2) Pengambilan sampel responden; dalam hal ini ditetapkan sebanyak 60 Kepala Keluarga yang diambil dengan teknik *random sampling* (sampel acak) sebanyak 15 orang pada setiap desa sampel area.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan

Data

Insrtrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- Koesioner, yaitu daftar pertanyaan dalam bentuk angket berstruktur. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden.
- Interview, yaitu wawancara langsung dengan responden. Teknik ini digunakan sebagai pendukung atau melengkapi teknik kuesioner untuk mendapatkan data primer.
- Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang tersedia dikantor lokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik deskriptif dan statistik inferensial.

- Analisis statistik deskriptif yang digunakan ialah analisis tabel frekuensi dan persentase. Teknik analisis ini digunakan untuk

mengetahui tentang status variabel kebijakan pemekaran wilayah kecamatan (X), dan variabel pelayanan publik (Y). Perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana :

P = nilai persentase yang dicari ;

f = frekuensi, yaitu banyaknya data pada setiap kategori ;

n = total data sampel.

➤ Analisis statistik inferensial atau statistik parametrik yang digunakan ialah analisis regresi sederhana dan korelasi sederhana :

- Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas “kebijakan pemekaran wilayah kecamatan(X)” terhadap variabel terikat “pelayanan publik (Y)”. Pola hubungan pengaruh dinyatakan dengan persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

a = nilai konstan variabel pelayanan publik (Y) apabila variabel kebijakan pemekaran wilayah kecamatan(X) tidak berubah / tetap; dihitung dengan rumus :

$$a =$$

$$\frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b = koefisien arah regresi variabel Y atas variabel X, yaitu besar perubahan pada nilai variabel Y yang

disebabkan atau diakibatkan oleh perubahan pada variabel X; dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Tingkat keberartian regresi diuji dengan statistik-F (Sudjana, 1990).

- Analisis korelasi sederhana (korelasi product moment) digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besar pengaruh dari variabel bebas “kebijakan pemekaran wilayah kecamatan”(X) terhadap variabel terikat “pelayanan publik”(Y). Analisis korelasi yang digunakan ialah analisis korelasi product moment atau korelasi r-pearson, dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Selanjutnya, tingkat signifikansi koefisien korelasi diuji dengan menggunakan rumus statistik-t (Sudjana, 1990).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kema

➤ Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Kema merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Kema merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Kauditan. Kecamatan Kema terletak

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kema.

Kecamatan Kema mempunyai luas wilayah sebesar 120,96KM² yang terbagi pada 10 Desa yang ada di kecamatan ini. Jumlah penduduk Kecamatan Kema hingga akhir tahun 2014 yaitu sebanyak 16,051 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8,223 jiwa atau 51,23% dan perempuan sebanyak 7,828 jiwa atau 48,76%. Jumlah kepala keluarga sebanyak 4494 KK.

Penduduk kecamatan Kema kabupaten Minahasa utara sebagian besar bekerja disektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, namun ada juga yang bekerja di sektor peternakan, perikanan, pertambangan, jasa perdagangan, PNS, nelayan, dan lainnya.

- Keadaan Sosial Budaya
 - Pendidikan

Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah adalah apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dan berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah terus berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. Di wilayah kecamatan Pasan

terdapat sarana/prasarana pendidikan (sekolah) mulai dari TK sampai SLTA.

Di wilayah kecamatan Kema tersedia sarana pendidikan mulai dari TK sampai SLTA dengan rincian banyaknya sekolah yaitu TK sebanyak 8 unit/buah, SD 17 unit/buah, SMP sebanyak 7 unit/buah, SMA sebanyak 3 unit/buah dan SMK 1 unit/buah.

Selain faktor pendidikan, faktor kesehatan juga sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan harus diupayakan pada setiap wilayah kecamatan.

Banyaknya sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Kema yang digambarkan pada Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa di wilayah ini tersedia sebanyak 1 unit Puskesmas dan 4 unit Puskesmas Pembantu, 9 posyandu 2 pos kesehatan desa. Sedangkan tenaga kesehatan yang tersedia yaitu sebanyak 3 orang dokter, 8 orang perawat, dan 1 orang bidan.

Faktor lain yang juga penting untuk pembangunan kualitas SDM masyarakat adalah faktor agama. Oleh karena itu pembangunan di bidang keagamaan terus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Berkaitan dengan itu maka sarana dan prasarana keagamaan atau peribadatan merupakan salah satu prasyarat.

Data tentang banyaknya sarana/prasarana peribadatan di kecamatan Kema tersedia secara memadai untuk semua golongan agama yang ada yaitu Gereja Potestan sebanyak 32 unit/buah, Gerejakatolik 5 unit/buah, dan Mesjid 9 unit/buah.

- Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah kecamatan Kema adalah pertanian tanaman pangan terutama padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah dan kacang hijau,

keledai, dan ubi kayu dan ubi jalar ubi jalar.

Di wilayah kecamatan Kema juga cukup potensial tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, rempah-rempah, dan buah-buahan.

Tanaman buah-buahan yang juga potensial di wilayah kecamatan Kema adalah seperti nenas, duku/lansat alpukat, papaya, mangga, dan manggis.

Selain tanaman pangan, potensi pertanian kecamatan Kema adalah tanaman komoditi perkebunan, yaitu tanaman Kelapa, tanaman Kakao/Coklat, dan tanaman Kopi dan Aren.

➤ Jumlah Aparatur Pemerintah Kecamatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa hanya akan berjalan lancar, efisien dan efektif jika didukung dengan tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai.

Berdasarkan data Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Kema Tahun 2014, jumlah aparat kecamatan Kema adalah sebanyak 22 orang PNS yaitu di Kantor Camat sebanyak 13 orang dan di Desa (Sekdes PNS) 9 orang.

28 orang pegawai negeri sipil pemerintah kecamatan Kema, sebanyak 1 orang atau 3,57% berpendidikan strata Dua (S2), 11 orang berpendidikan strata satu (S1) atau 39,2% dan berpendidikan SLTA 16 orang 57,1%.

Jumlah pegawai pemerintah kecamatan Kema dilihat dari segi golongan kepangkatan yaitu sebagian besar adalah merupakan pegawai Golongan (IIIa dan IIa) yaitu sebanyak 10 orang atau 22,72%, yang lainnya adalah Golongan III (IIIb dan IIIc) yaitu sebanyak 3 orang atau 13,6%, Golongan III (IIIb) sebanyak 2 orang atau 9,09% Golongan

IV dan Golongan I (Ic) (IVa) hanya sebanyak 1 orang atau 4,54%.

Jumlah aparat/perangkat pemerintah Desa di kecamatan Kema sekarang ini adalah sebanyak 240 orang tersebar di 10 desa.

Deskripsi Variabel Penelitian

➤ Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab metodologi penelitian di atas bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan disini adalah keputusan pemekaran Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kauditan, dan Kecamatan Kema sebagai kecamatan hasil pemekaran. Variabel pemekaran wilayah tersebut diamati dalam beberapa indikator yaitu : (1) peningkatan jangkauan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (2) kemudahan masyarakat untuk menjangkau pusat pelayanan pemerintah kecamatan (kantor Camat); (3) tersedianya SDM aparatur pelayanan publik pada pemerintah kecamatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; (3) tersedianya sumberdaya finansial (dana/anggaran) serta sarana dan fasilitas yang memadai pada pemerintah kecamatan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan indikator yang dipakai dalam pengukuran kebijakan pemekaran wilayah tersebut, maka disusun sebanyak 12 item pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk angket berstruktur dengan menggunakan skala ordinal dalam lima tingkatan. Setiap pertanyaan terdapat 5 (lima) tingkatan alternatif jawaban yang diberi nilai score yaitu : alternatif jawaban pertama (terbaik/tertinggi)

diberi nilai 5, alternatif jawaban kedua diberi nilai 4, alternatif jawaban ketiga diberi nilai 3, alternatif jawaban keempat diberi nilai 2, dan alternatif jawaban kelima/terendah diberi nilai 1. Oleh karena banyaknya pertanyaan ada 12 item maka dengan demikian total nilai (score) teoritik/ideal untuk variabel kebijakan pemekaran wilayah adalah $12 \times 5 = 60$. Namun dari hasil tabulasi data (60 orang responden) ternyata score maksimum untuk variabel kebijakan pemekaran wilayah kecamatan = 49 dan score terendah adalah = 30. Dengan demikian rentang (R) score tertinggi dan score terendah untuk variabel kebijakan pemekaran wilayah adalah $49 - 30 = 19$.

Dalam penelitian ini penilaian/pengukuran variabel kebijakan pemekaran wilayah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kategori yaitu : tinggi/baik, sedang/cukup baik, rendah/kurang baik, sehingga Banyak Kelas Interval (BK_i) adalah = 3. Sedangkan Panjang Kelas Interval (PK_i) untuk setiap kategori kebijakan pemekaran wilayah dihitung dengan cara membagi rentang score tertinggi-terendah (R) dengan banyak kelas interval (BK_i). Dari perhitungan di atas didapat nilai rentang (R) score tertinggi-terendah = 19, sedangkan banyak kelas interval (BK_i) = 3, sehingga didapat Panjang Kelas Interval (PK_i) adalah $19 : 3 = 6,33$ (dibulatkan = 6). Dengan Panjang Kelas Interval = 6 maka distribusi score untuk setiap kategori kebijakan pemekaran wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Kategori “tinggi/baik”: score 49 s/d 44;
- (2) Kategori “sedang/cukup baik”: score 43 s/d 37;
- (3) Kategori “rendah/kurang baik”: score 36 s/d 30.

Berdasarkan kategorisasi penilaian/pengukuran kebijakan pemekaran wilayah tersebut, maka selanjutnya dilakukan

perhitungan distribusi data (score) hasil tabulasi data untuk 60 orang responden penelitian ini (lihat lampiran daftar distribusi data atau raw score). Dari perhitungan terhadap raw score diperoleh gambaran tentang tanggapan responden terhadap kebijakan pemekaran wilayah.

kebijakan pemekaran wilayah di Kecamatan Kema, yaitu dari 60 orang responden yang diteliti ada sebanyak 2 orang atau 3,3% yang telah menilai kebijakan pemekaran wilayah pada kategori tinggi/baik, kemudian ada 43 orang atau 71,1% yang menilai kebijakan pemekaran wilayah berada pada kategori sedang/cukup baik. Sedangkan aparatur yang menilai kebijakan pemekaran wilayah terkategori rendah 15 orang atau 25,0% .

Hasil penelitian penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan Kauditan menjadi kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema telah memberikan hasil cukup baik dalam meningkatkan jangkauan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pusat pelayanan pemerintah kecamatan (kantor camat), meningkatnya tersedianya SDM aparatur pelayanan publik pada pemerintah kecamatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan meningkatkan tersedianya sumberdaya finansial (dana/anggaran) serta sarana dan fasilitas yang memadai pada pemerintah kecamatan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

➤ Pelayanan Publik

Dikemukakan pada uraian metodeologi penelitian bahwa dalam penelitian ini variabel pelayanan publik didefinisikan sebagai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Secara variabel ini diamati dan diukur dari

beberapa indikator sebagai berikut : (1) Kemudahan pelayanan (meliputi : persyaratan administrasi, persyaratan teknis); (2) Kecepatan pelayanan, yaitu kecepatan dalam merespons atau melayani keperluan/kebutuhan masyarakat; (3) Ketepatan pelayanan (meliputi : prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan); dan (4) Akurasi produk pelayanan (meliputi : kualitas produk layanan, ketelitian produk layanan, kepuasan atas produk layanan).

Berdasarkan tabulasi data (lihat lampiran raw score) menunjukkan score maksimum/tertinggi untuk variabel pelayanan publik adalah = 54 dan score minimum/terendah = 35. Dengan demikian rentang (R) score maksimum/tertinggi – minimum/terendah adalah $54 - 35 = 19$. Dalam penelitian ini penilaian/pengukuran terhadap variabel pelayanan publik juga dibagi kedalam ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu : tinggi/baik, sedang/cukup baik, rendah/kurang baik. Dengan demikian banyaknya kelas interval (Bki) adalah = 3. Selanjutnya, panjang kelas interval (Pki) untuk setiap kategori dihitung dengan cara membagi rentang score tertinggi-terendah (R) dengan banyak kelas interval (Bki), sehingga didapat panjang kelas interval (Pki) untuk setiap kategori tingkat pelayanan publik adalah $19 : 3 = 6,33$. Dengan demikian rentang score untuk setiap kategori tingkat pelayanan publik yang dipakai dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Kategori “tinggi/baik”: score 54 s/d 49;
- (2) Ketegori “sedang/cukup baik: score 48 s/d 42;
- (3) Kategori “tinggi/baik”: score 41s/d 35.

Tingkat pelayanan publik di kecamatan Kema. Dari 60 orang responden yang diteliti ada sebanyak 2

orang atau 3,3% yang tmeninai/menanggapi pelayanan publik pemerintah kecamatan Kema terkategori “tinggi/baik, kemudian ada 38 orang atau 63,3% yang menlai terkategori “sedang/cukup baik”, dan yang menilai pada kategori rendah ada 20 orang atau 33,3%. Dengan demikian pelayanan publik di kecamatan Kema berada kategori sedang/cukup baik sampai tinggi/baik dan rendah/kurangbaik. namun yang lebih banyak adalah yang memilih sedang/cukup baik.

Hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan publik di kecamatan Kema umumnya terkategori cukup baik dilihat dari indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu (1) Kemudahan pelayanan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis); (2) Kecepatan pelayanan, yaitu kecepatan dalam merespons atau melayani keperluan/kebutuhan masyarakat; (3) Ketepatan pelayanan (prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan); dan (4) Akurasi produk pelayanan (kualitas produk layanan, ketelitian produk layanan, kepuasan atas produk layanan).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 orang responden warga masyarakat di Kecamatan Kema ternyata menemukan bahwa kebijakan pemekaran wilayah mempunyai hubungan fungsional dan pengaruh positif terhadap pelayanan publik.

Hasil analisis regresi linier didapat persamaan regresi linier yang menunjukkan hubungan fungsional kebijakan pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik di

Kecamatan Kema yaitu $\hat{Y} = 6,534 + 0,956 X$. Koefisien regresi $b = 0,956$ yang bertanda positif tersebut jelas menunjukkan bahwa hubungan fungsional/pengaruh variable kebijakan pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik adalah positif dengan pola perkembangan $1 : 0,956$; artinya perubahan/peningkatan kebijakan pemekaran wilayah sebesar 1 skala/satuan akan menyebabkan perubahan/peningkatan pelayanan publik $0,837$ satuan/skala. Pola hubungan fungsional/pengaruh kebijakan pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik tersebut adalah sangat berarti atau sangat signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian keberartian regresi dengan uji-F didapat nilai $F_{hitung} = 298,212$ pada taraf signifikan $0,000$.

Hasil analisis korelasi product moment (*pearson correlation*) juga menunjukkan adanya korelasi dan daya determinasi/penentu kebijakan pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik. Hal itu ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar $0,915$ (yang mendekati angka maksimum koefisien korelasi yakni $1,000$), dan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar $0,837$ atau $83,7\%$. Hasil analisis korelasi ini mempunyai makna bahwa kebijakan pemekaran wilayah mempunyai korelasi dan daya penentu/pengaruh sebesar $83,7\%$ terhadap pelayanan publik di kecamatan Kema. artinya peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kema sebesar $83,7\%$ dipengaruhi oleh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, sedangkan sisanya $16,3\%$ ditentukan oleh variabel lain.

Hasil analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment tersebut secara bersama-sama dapat memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kema. Dengan demikian hipotesis yang diajukan/diuji dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan pada uraian tinjauan pustaka

di atas, dapat dinyatakan teruji atau diterima dengan sangat meyakinkan.

Untuk memprediksi peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kema sebagai dampak atau pengaruh dari kebijakan pemekaran wilayah maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga tertentu dari variabel kebijakan pemekaran wilayah ke dalam persamaan regresi hasil analisis data. Dengan metode interpolasi ini maka apabila kualitas kebijakan pemekaran wilayah kecamatan Kema dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini (yakni 60), maka dapat diprediksi peningkatan di masa depan pelayanan publik di Kecamatan Kema yaitu sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 6,534 + 0,956 (60) = 63,894$$

Hasil perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila kualitas kebijakan pemekaran wilayah dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal variabel tersebut (yakni 60) dari kondisi yang ada sekarang, maka dapat diprediksi terjadi peningkatan pelayanan publik di kecamatan Kema sebesar $63,894$ skala. Hasil perhitungan prediksi ini dapat memberi petunjuk bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik; artinya di masa depan akan terjadi peningkatan signifikan pelayanan publik apabila kualitas kebijakan pemekaran wilayah dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah kebijakan pemekaran wilayah harus ditingkatkan kualitasnya apabila menghendaki peningkatan yang signifikan pelayanan publik di masa-masa yang akan datang.

Hasil analisis regresi linier, analisis korelasi product moment serta pengujian prediksi tersebut sekaligus membuktikan

kebenaran kajian kerangka teoritis yang dibangun sebagai landasan teori dalam penelitian ini Sebagaimana diuraikan dalam Bab II dari skripsi ini bahwa secara teoritis pemekaran wilayah dapat memberikan dampak ataupun pengaruh positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Sepertidikatakan oleh Praharsena (2013) bahwa pembentukan wilayah baru yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa diuntungkan dalam berbagai aspek sosial. Demikian pula menurut Arif Ratnawati (dalam Rustiadi, 2009) bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran wilayah atau daerah pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah di era otonomi daerah seperti sekarang ini dipandang sebagai suatu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah untuk pemerintahan baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Kebijakan pemekaran wilayah/daerah lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah/daerah dapat memperpendek rentan kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dan hekekat kebijakan pemekaran wilayah seperti disebutkan di atas dapat dibuktikan atau dibenarkan dalam penelitian ini, bahwa ternyata

kebijakan pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Dengan pembentukan Kecamatan Kema (pemekaran dari Kecamatan Kauditan) telah dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, tepat, akurat dan berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara menjadi kecamatan Kauditan dan kecamatan Kema telah menyebabkan adanya peningkatan jangkauan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pusat pelayanan pemerintah kecamatan (kantor camat); tersedianya SDM aparatur pelayanan publik pada pemerintah kecamatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan tersedianya sumberdaya finansial (dana/anggaran) serta sarana dan fasilitas yang memadai pada pemerintah kecamatan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- Pelayanan publik di Kecamatan Kema umumnya sudah cukup baik dilihat dari indikator pengukuran yang dipakai yaitu : kemudahan pelayanan (persyaratan administrasi, persyaratan teknis); kecepatan pelayanan, yaitu kecepatan dalam merespons atau melayani keperluan/kebutuhan masyarakat; ketepatan pelayanan (prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan); dan

akurasi produk pelayanan (kualitas produk layanan, ketelitian produk layanan, kepuasan atas produk layanan).

- Berdasarkan analisis regresi linier dan korelasi sederhana bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan punya hubungan fungsional dan pengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik pemerintah Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembentukan kecamatan Kema yang merupakan pemekaran dari kecamatan Kauditan, telah dapat meningkatkan pelayanan publik pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan berkualitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, hasil penemuan dalam maka dapatlah dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

- Pemekaran wilayah kecamatan harus didukung dengan penyediaan sumber daya aparatur yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelaksanaan tugas yang memadai, serta alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah kecamatan.
- Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara masih perlu ditingkatkan baik dalam hal kemudahan pelayanan (persyaratan administrasi dan persyaratan teknis), kecepatan pelayanan (kecepatan dalam merespons atau melayani keperluan/kebutuhan masyarakat), ketepatan pelayanan (prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan); maupun akurasi produk pelayanan (kualitas produk layanan, ketelitian produk layanan, kepuasan atas produk layanan).

- Pemekaran wilayah kecamatan merupakan salah satu alat atau cara untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga itu kebijakan pemekaran wilayah kecamatan harus didukung oleh semua pihak, termasuk dukungan partisipasi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S., 2001, *Globalisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Governance*, dalam Jurnal Administrasi Negara Unibraw Malang Vol.02 Tahun 2001.
- Abdulwahab, S, 2008, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Arikunto, S., 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta Rineka Cipta.
- Barata, Atep, 2004, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Halim,A. 2002, *Akuntabilitas dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP-YKPN.
- Islamy, M.I, 1996, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Islamy,M.I, Agenda Kebijakan Reformasi Negara, *dalam Jurnal Administrasi Negara Unibraw Malang Vol 02 Tahun 2001.*

Kasmir, 2006, *Manajemen Pelayanan Perbankan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Lukman, S., 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, STIA LAN Press.

Moenir, H.A.S., 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiono, S. 2000, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Umar, H. 1997, *Metodologi Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Yousa, A., 2002, *Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Penerapan pada Pemerintah Kecamatan*, Makalah, STPDN Jatinogor Jawa Barat.

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.